

**ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO
18/PUU-XVII/2019 TENTANG KEKUATAN EKSEKUTORIAL PERJAN-
JIAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO-
MOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUDSIA**

WILFED IVANIEL MAKMUR

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebelum dan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU- XVII/2019. Dan Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan hak Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Metode penelitian yang dipergunakan penulis merupakan metode penelitian. Penelitian Hukum Normatif yang merupakan sebuah penelitian yang meneliti hukum secara murni dan memberikan suatu pandangan terhadap hukum sebagai suatu ilmu yang mandiri tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor empiris. Penelitian Empiris yang merupakan sebuah metode penelitian dengan menggunakan metode wawancara yang akan dijadikan sebagai sumber dukungan data pada penulisan penelitian ini.

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi terdapat sejumlah hal setelah penelitian ini dilakukan. Yaitu terdapat sejumlah perbandingan pelaksanaan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebelum dan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU- XVII/2019. Perbedaan yang terdapat pada mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Sebelumnya, pihak kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia hanya dengan sertifikat jaminan fidusia. Setelah keluarnya putusan tersebut, maka terjadi perubahan pada mekanisme eksekusi yaitu ketika debitur tidak merelakan objek jaminan fidusia untuk di eksekusi, maka mekanisme eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan negeri setempat. Kemudian mengenai implementasi pada pelaksanaan hak Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel pada penelitian ini putusan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan perkembangan hari ini, putusan tersebut tidak memberikan pengaruh yang besar sehingga kreditur baik dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel tidak mematuhi putusan tersebut. wawancara yang dilakukan pada penelitian dapat disimpulkan bahwa kreditur hingga pada hari ini tidak patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019.

**KATA KUNCI : Jaminan Fidusia, Kreditur, Debitur,
Eksekusi, Putusan.**

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL COURT ORDER NO 18/PUU-XVII/2019 CONCERNING THE EXECUTORIAL POWER OF THE FIDUCIARY GUARANTEE AGREEMENTS ACT NUMBER 42 YEAR 1999 ABOUT CONCERNING THE FIDUCIARY GUARANTEE

WILFRED IVANIEL MAKMUR
ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the comparison of the implementation of Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees before and after the issuance of Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. And to find out the implementation of Fiduciary Guarantee rights in the South Jakarta District Court Decision No. 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel.

The research method used by the author is a research method. Normative Legal Research which is research that examines law purely and provides a view of law as an independent science without being influenced by empirical factors. Empirical Research which is a research method using interview methods which will be used as a source of data support in writing this research.

The results of research in writing a thesis include a number of things after this research was carried out. Namely, there are a number of comparisons in the implementation of Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees before and after the issuance of Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. The differences exist in the mechanism for executing fiduciary guarantees. Previously, creditors could execute fiduciary collateral objects only with a fiduciary guarantee certificate. After the decision was issued, there was a change in the execution mechanism, namely when the debtor did not give up the object of the fiduciary guarantee for execution, the execution mechanism had to be carried out through the local district court. Then regarding the implementation of Fiduciary Guarantee rights in the South Jakarta District Court Decision No. 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel in this research the decision was not implemented in accordance with today's developments, the decision did not have a big influence so that creditors both in the decision of the South Jakarta District Court No. 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel does not comply with the decision. interviews conducted during the research can be concluded that creditors to this day do not comply with the Constitutional Court decision No. 18/PUU-XVII/2019.

KEYWORDS: Fiduciary Guarantee, Creditors, Debtors, Execution, Court Order